

BPKP Diminta Serius dalam Tugas

Achmad Munandar
Borneo Tribune, Pontianak

Dalam kunjungan ke Kota Pontianak tepatnya di Auditorium Universitas Panca Bakti, Kamis (28/4) lalu, Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas mengingatkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pembangunan (BPKP) Serius dalam tugas serta tanggungjawabnya.

Ini disampaikan Busyro demi menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh BPKP Kalbar. Terkait dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Koni Kalimantan Barat Busyro mengatakan bahwa kasus tersebut sudah ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar, dengan begitu juga KPK memberi kewenangan penuh kepada pihak penyidik Polda untuk menindak lanjuti kasus tersebut.

"Jika sudah ditangani Polda atau Kejati kita tidak boleh turut campur lagi, dan ini bukan berarti KPK tidak memiliki kewenangan lagi akan tetapi peran KPK tidak secara langsung kita harus ikuti prosedur yang ada, suatu saat KPK juga akan bisa melakukan pemeriksaan," katanya.

"Jika memang ada laporan yang masuk pihak kita akan meresponnya akan tetapi dengan ketentuan lengkapi barang bukti dan alat bukti merupakan hal yang paling utama dalam proses penyidikan, karena apa? Saya beri contoh ya mesih ingat semua dengan kasus Century itu dugaan korupsinya sangat kuat sekali akan tetapi sampai sekarang belum terbukti dugaan korupsi karena itu tadi tidak lengkapnya alat bukti," paparnya.

Selain itu Ia juga mengatakan dalam menanggapi tanggapan berbagai pihak LSM yang telah mempersolakan jabatannya sebagai ketua KPK hanya satu tahun dari seharusnya empat tahun Busyro mengatakan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi kinerjanya sebagai ketua KPK, namun Busyro tetap pada komitmennya untuk memberantas korupsi sampai pada akhir jabatannya.

"Itu kan hanya teman-teman LSM yang berkata, saya sendiri maunya agar sampai Desember menjalankan tugas dengan baik dan tidak adanya masalah yang serius lagi," pungkasnya.

Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada saksi yang sudah kita periksa yakni Bagian Keuangan Sekda Propinsi Kalbar yang berjumlah 11 orang, sedangkan Koni Provinsi Kalbar 7 orang, pengurus cabang olah raga 16 orang dan Dirjen Pengeluaran Keuangan Daerah Kementrian Daerah satu orang.

"Sudah banyak saksi yang kita periksa saat ini, dari beberapa saksi yang kita periksa terkait dugaan korupsi tersebut mengarah dua oknum anggota DPR RI, namun sampai saat ini pihak kita belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap kedua oknum DPR RI tersebut lantaran pihaknya belum mendapatkan izin dari Presiden untuk melakukan pemeriksaan."

Mukson juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim surat izin ke Mabes Polri untuk ditangani oleh Kapolri dan ditembuskan ke Presiden terkait dua oknum Anggota DPR RI yang hendak dilakukan pemeriksaan di Polda Kalbar lantaran diduga terlibat tindakan korupsi. □